

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syamsul. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Mohammad. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dalam Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Liberty
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____.2008. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2003. *Metore Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi., Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel, Jurnal dan Internet

ACILS., ICMC. “Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia”.

<http://gugustugastrafficking.com/>. Diakses tanggal 14 Juni 2016, Pukul 11.22 WIB.

Anwar, Laraswati Ariadne. “Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia”. <http://print.kompas.com/>. Diakses tanggal 21 Maret 2016, Pukul 10.57 WIB.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Profil Pengguna Internet Indonesia 2014”. <http://slideshare.net/>. Diakses tanggal 13 Juni 2016, Pukul 11.35 WIB.

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum”. www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 17 Mei 2016, Pukul 10.06 WIB.

Badan Pusat Statistik. “Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2013” <http://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 10 Maret 2016, Pukul 10.17 WIB.

_____. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen”. <http://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 10 Maret 2016, Pukul 07.00 WIB.

Masri, Melinda. “Polisi Bongkar Penjualan Orang Melalui Dunia Maya”. <http://metro.sindonews.com/>. Diakses tanggal 22 Februari 2016, Pukul 20.45 WIB.

Natalia, Desca Lidya. “Deretan Aparat Penegak Hukum di Tangan KPK”. <http://www.antaraneews.com/berita/562954/deretan-aparat-penegak-hukum-di-tangan-kpk>. Diakses tanggal 11 Juli 2016. Pukul 19.40 WIB.

Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga. “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bantul”. sapaindonesia.wordpress.com/2012/11/19/sosialisasi-traffickin/. Diakses tanggal 11 Juli 2016, Pukul 18.50 WIB.

Toule, Elsa R.M. “Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)”. <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/>. Diakses tanggal 21 Maret 2016, Pukul 10.29 WIB.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.